

Perbedaan Kualitas Laba Sebelum dan Sesudah Adopsi *International Accounting Standards* (IAS) 39 Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia

Yogka Arief Pratama

Dewi Ratnaningsih

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Jalan Babarsari 43-44, Yogyakarta

Abstrak

Adopsi *International Accounting Standards* (IAS) pada standar akuntansi di Indonesia dewasa ini sedang menjadi suatu fenomena yang menarik untuk dibahas. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kualitas laba antara sebelum dan sesudah adopsi *International Accounting Standards* (IAS) 39 pada 27 perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Perhitungan kualitas laba dalam penelitian ini menggunakan model akrual khusus yang dikembangkan oleh Beaver dan Engel (1996). Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa Laporan Keuangan Tahunan tahun 2008-2013. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2008 sampai tahun 2013. Pemilihan populasi penelitian menggunakan metode *purposive sampling*. Dalam penelitian ini variabel kualitas laba akan diproses dengan manajemen laba. Kemudian data diuji menggunakan *paired sample t-test*. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan kualitas laba antara sebelum dan sesudah adopsi IAS 39 pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI.

Kata kunci: Kualitas laba, manajemen laba, adopsi *International Accounting Standards*

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Di sektor perbankan, penerapan kedua PSAK hasil adopsi IAS ini menurut Anggraita (2012) berdampak pada penyisihan kerugian kredit atau cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN). Anggraita (2012) mengemukakan bahwa PSAK 55 yang telah mengadopsi standar akuntansi internasional, CKPN ditentukan berdasarkan pada data historis kerugian kredit yang telah terjadi minimal tiga tahun dan maksimal lima tahun kebelakang. Sebelumnya perhitungan CKPN didasarkan pada ekspektasi kerugian kredit (*expectation loss*) sehingga bank dapat menumpuk cadangan yang berasal dari laba dengan alasan kehati-hatian. Penumpukan CKPN dilakukan ketika

bank merasa kemungkinan kredit tidak tertagih lebih besar. Kebijakan inilah yang kemudian digunakan oleh manajemen sebagai celah untuk melakukan manajemen laba.

Selain berdampak pada penentuan CKPN (*loan loss provision*), adopsi IAS 39 (2005) juga berdampak dalam hal reklasifikasi investasi efek tertentu. PSAK 55 yang telah mengadopsi IAS 39 dalam hal reklasifikasi antar instrumen keuangan lebih ketat dibandingkan sebelum mengadopsi (Anggraita, 2012). PSAK 50 (1998) masih memperbolehkan perusahaan melakukan reklasifikasi untuk instrumen keuangan yang sebelumnya telah direklasifikasi, dengan mengakui laba atau rugi. Alternatif inilah yang memungkinkan manajemen untuk melakukan manajemen laba.

Menurut Leisa Jang (2007) laba akuntansi yang berkualitas adalah laba akuntansi yang dapat mencerminkan kinerja keuangan perusahaan yang sebenarnya dengan sedikit atau tidak dipengaruhi oleh manajemen laba yang disebabkan dari penerapan konsep akrual dalam akuntansi (*perceived noise*). Dengan kata lain, semakin tingginya tingkat *perceived noise* yang terdapat dalam laba akuntansi, maka kualitas laba akuntansi tersebut akan semakin rendah.

Penelitian mengenai pengaruh adopsi IAS di Indonesia, khususnya penerapan PSAK No. 55 (2011) terhadap kualitas laba yang berfokus pada instrumen keuangan perbankan masih sedikit dilakukan. Penelitian ini merujuk dari penelitian yang dilakukan oleh Daniel dkk. (2012) pada perusahaan yang terdaftar dalam *database* Thomson WorldScope di 15 negara anggota Uni Eropa. Di Indonesia, penelitian ini juga merujuk pada penelitian Anggraita (2012) yang menggunakan sampel pada seluruh perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI. Masih sedikitnya penelitian mengenai pengaruh adopsi *International Accounting Standards* (IAS) menjadi PSAK No. 55 (2011) terhadap kualitas laba di perusahaan perbankan memotivasi dilakukannya penelitian ini.

Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

Apakah kualitas laba pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) meningkat setelah mengadopsi *International Accounting Standards* (IAS) 39?

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah membandingkan kualitas laba antara sebelum dan sesudah adopsi IAS 39 pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode tahun 2008-2013.

Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

1. Penulis, sebagai pengalaman dan wawasan dibidang akuntansi keuangan terutama dampak penerapan standar akuntansi internasional.
2. Akademis, sebagai sumbangan ide untuk referensi penelitian selanjutnya. Terkhusus penelitian tentang kualitas laba dan dampak adopsi standar akuntansi internasional.

B. LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Instrumen Keuangan

Dalam PSAK 50 (revisi 2010) par. 07, instrumen keuangan didefinisikan sebagai setiap kontrak yang menambah nilai aset keuangan entitas dan liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas entitas lain. Sebelum mengadopsi IAS 39, istilah instrumen keuangan dalam PSAK 50 (1998) par. 06 disebut sebagai 'efek' yang memiliki definisi surat berharga, yaitu surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, dan unit penyertaan kontrak investasi kolektif. Dalam PSAK 50 (1998) dan PSAK 55 (1998) instrumen keuangan lebih mengacu pada jenisnya, seperti surat pengakuan hutang, saham, obligasi dan sebagainya, sedangkan instrumen keuangan dalam PSAK 50 (revisi 2010) menekankan pada 'kontrak' sehingga memiliki cakupan yang lebih luas.

Istilah 'kontrak' dan 'kontraktual' dalam PSAK 50 (revisi 2010) par. 09 mengacu pada suatu kesepakatan antara dua pihak atau lebih, yang memiliki konsekuensi ekonomi yang jelas dan kecil peluangnya akan diabaikan oleh pihak-pihak yang terlibat, umumnya karena pemenuhan kesepakatan ini dapat dipaksakan secara hukum. Berdasarkan PSAK 50 (revisi 2010) instrumen keuangan dibedakan menjadi 6 jenis yaitu aset keuangan, liabilitas keuangan, instrumen ekuitas, instrumen derivatif, instrumen lindung nilai, dan instrumen yang mempunyai fitur opsi jual (*puttable instrument*).

Manajemen Laba

Fischer dan Rosenzweig (1995) dalam Sulisyanto (2008) mendefinisikan manajemen laba adalah tindakan yang dilakukan manajer untuk menaikkan (menurunkan) laba periode berjalan tanpa menyebabkan kenaikan (penurunan) keuntungan ekonomi perusahaan jangka panjang. Manajemen laba dapat dilakukan dengan beberapa metode, salah satunya adalah berbasis akrual. Manajemen laba berbasis akrual merupakan manajemen laba yang dilakukan dengan memanfaatkan alternatif pada komponen akrual dalam laporan keuangan.

Terdapat beberapa metode empiris yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi manajemen laba, antara lain model yang berbasis *specific accruals* yang dikembangkan oleh McNichols dan Wilson, Petroni, Beaver dan Engel, Beneish, serta Beaver dan McNichols. Model *specific accruals* atau akrual khusus merupakan pendekatan yang menghitung akrual sebagai proksi manajemen laba dengan menggunakan item laporan keuangan tertentu dari entitas tertentu pula.

Kualitas Laba

Kualitas laba menurut Grahita (2001) dalam Sugiarto dan Jang (2007), laba akuntansi yang berkualitas adalah laba akuntansi yang dapat mencerminkan kinerja keuangan perusahaan yang sebenarnya dengan sedikit atau tidak dipengaruhi oleh manajemen laba yang disebabkan dari penerapan konsep akrual dalam akuntansi (*perceived noise*). Semakin tingginya tingkat *perceived noise* yang terdapat dalam laba akuntansi, maka kualitas laba akuntansi tersebut akan semakin rendah pula (Leisa Jang, 2007).

Dalam Saputra (2013), penelitian yang dilakukan oleh Francis dkk. (2004) yang mengidentifikasikan 7 cara mengukur kualitas laba (atribut laba). Tujuh karakteristik kualitas laba ini merupakan atribut dari "*accounting-based*" atau "*market-based*", tergantung pada asumsi pokok mengenai fungsi laporan keuangan. Atribut laba berbasis akuntansi antara lain kualitas akrual (*accrual quality*), *persistence*, daya prediksi (*predictability*), dan perataan (*smoothness*). Sedangkan laba berbasis pasar beratributkan relevansi nilai (*value relevance*), ketepatan waktu (*timeliness*), dan konservatisme (*conservatism*).

Pengukuran Kualitas Laba

Terdapat beberapa model empiris yang dapat digunakan untuk mengukur kualitas laba, antara lain model yang dikembangkan oleh Penman (2001), Leuz dkk (2003), serta Beaver dan Engel (2006) (Saputra, 2013). Menurut Rahmawati (2007) dan Saputra (2013) model empiris yang dikembangkan oleh Beaver dan Engel (1996) merupakan model empiris yang lebih tepat untuk mengukur kualitas laba pada perusahaan perbankan. Sedangkan model empiris yang dikembangkan oleh Penman (2001) dan Leuz dkk (2003) merupakan model pengukuran kualitas laba secara umum yang dapat digunakan pada perusahaan manufaktur, perusahaan jasa, dan perusahaan dagang (Saputra, 2013). Oleh sebab itu penelitian ini menggunakan model yang dikembangkan oleh Beaver dan Engel (1996).

Perkembangan Standar Akuntansi Keuangan Tentang Instrumen Keuangan Di Indonesia

Sebelum mengadopsi *International Accounting Standards* (IAS) 32 dan 39 (2009), PSAK 50 (1998) dan PSAK 55 (1999) mengacu pada SFAS 115 tentang *Accounting for Certain Investment in Debt and Equity Securities* dan SFAS 133 tentang *Accounting for Derivative Instrument and Hedging Activities*. PSAK 50 (1998) tentang Akuntansi Infestasi Efek Tertentu dan PSAK 55 (1999) tentang Akuntansi Instrumen Derivatif dan Aktivitas Lindung Nilai mulai berlaku efektif 1 Januari 1999. Hal ini berkaitan dengan peraturan tentang pengukuran dan sistematika penyajian instrumen keuangan berdasarkan nilai wajar yang dikeluarkan oleh *Financial Accounting Standards Board* (FASB). Pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan selain berpedoman pada PSAK 50 (1998) dan PSAK 55 (1999) juga berpedoman pada PSAK 10 (1995), PSAK 28 (1996), PSAK 31 (2000), PSAK 36 (1996), PSAK 42 (1998), dan PSAK 43 (1997).

Bulan September dan Desember tahun 2006, IAI menerbitkan PSAK 50 (revisi 2006) tentang penyajian dan pengungkapan dan PSAK 55 (revisi 2006) tentang pengakuan dan pengukuran sehubungan dengan diterbitkannya IAS 32 (2005) : *Financial Instrument: Disclosure and Presentation* dan IAS 39 (2005) : *Financial Instrument: Recognition and Measurement*. Sebagai bentuk tanggapan atas perubahan peraturan tentang instrumen keuangan akibat konvergensi ke IAS 32 (2005) dan IAS 39 (2005) menjadi PSAK 50 (2006) dan PSAK 55 (2006), Bank Indonesia menerbitkan Surat Edaran No. 11/4/DPNP perihal pelaksanaan pedoman akuntansi perbankan Indonesia yang mewajibkan semua perusahaan perbankan di Indonesia untuk menyusun laporan keuangan sesuai dengan PSAK 50 (revisi 2006) dan PSAK 55 (revisi 2006) tentang instrumen keuangan (Boediono, 2008).

Pada awalnya PSAK 50 (revisi 2006) dan PSAK 55 (revisi 2006) efektif berlaku per 1 Januari 2008, namun berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/4/DPNP perihal pelaksanaan pedoman akuntansi perbankan Indonesia yang diterbitkan pada 27 Januari 2009, disebutkan bahwa penggunaan PSAK 50 (revisi 2006) dan PSAK 55 (revisi 2006) efektif berlaku pada 1 Januari 2010. Perihal instrumen keuangan yang mengatur tentang pengakuan dan pengukuran, pada bulan Oktober 2011 IAI menerbitkan PSAK 55 (revisi 2011) untuk menggantikan PSAK 55 (revisi 2006) yang sudah ada, sebagai bagian dari tahap penyempurnaan adopsi IAS 39 (2009) dan berlaku efektif pelaksanaan pada 1 Januari 2012. Perbedaan antara PSAK 55 (revisi 2006) dan PSAK 55 (revisi 2011) adalah peraturan mengenai reklasifikasi dari kelompok investasi ‘diukur pada nilai wajar melalui labar rugi’ ke kelompok ‘pinjaman yang diberikan dan piutang’ dan reklasifikasi dari ‘tersedia untuk dijual’ ke kelompok ‘pinjaman yang diberikan dan piutang’. Dengan kata lain PSAK 55 (revisi 2011) hanya sebagai bentuk upaya penyempurnaan IAS 39 yang sebenarnya sudah ada pada PSAK 55 (revisi 2006).

Perbedaan Antara Sebelum dan Sesudah Adopsi *International Accounting Standards* (IAS) 39

Sebelum mengadopsi IAS 39, PSAK 50 (1998) tentang Akuntansi Investasi Efek Tertentu dalam reklasifikasi hanya mengatur laba (rugi) yang belum direalisasi atas perubahan kelompok investasi (par.16). PSAK 50 (1998) masih menyediakan banyak alternatif kepada manajer dalam mengakui laba (rugi) yang belum direalisasi pada saat reklasifikasi akibat perbuahan dari nilai buku ke nilai wajar atau sebaliknya. Semakin banyak pilihan alternatif dalam pengakuan laba (rugi) inilah yang menjadi penyebab menurunnya kualitas laba. Selain itu, ini menjadi celah bagi manajer untuk melakukan manajemen laba. PSAK 50 (1998) masih memperbolehkan manajer untuk melakukan reklasifikasi dari kelompok 'diperdagangkan' (TS) ke 'tersedia untuk dijual' (AFS) atau sebaliknya dan mengakui laba (rugi) yang belum direalisasi saat reklasifikasi dalam laba bersih. Begitu pula sebaliknya saat reklasifikasi dari kelompok 'tersedia untuk dijual' (AFS) ke 'diperdagangkan' (TS) maka laba (rugi) yang belum direalisasi pada saat reklasifikasi diakui dalam laba bersih.

Selain itu saat terjadinya reklasifikasi kelompok investasi 'dimiliki hingga jatuh tempo' (HTM) ke 'tersedia untuk dijual' (AFS), PSAK 50 (1998) mengakui laba (rugi) belum direalisasi sebagai bagian dari ekuitas. Sehingga tidak berpengaruh pada laporan laba rugi. Namun berbeda halnya saat terjadi reklasifikasi dari kelompok investasi 'tersedia untuk dijual' (AFS) ke kelompok 'dimiliki sampai jatuh tempo' (HTM). Pada saat tanggal reklasifikasi laba (rugi) yang belum direalisasi yang sebelumnya telah diakui sebagai ekuitas harus diamortisasi secara periodik dalam sisa masa manfaat sekuritas berdasarkan metode yang sama dengan metode amortisasi premi (diskonto) yang digunakan.

Sedangkan pada PSAK 55 (2011) tentang Instrumen Keuangan : Pengakuan dan Pengukuran yang merupakan hasil adopsi dari IAS 39, mengatur reklasifikasi lebih ketat. Sehingga dapat mengurangi celah bagi manajer untuk melakukan praktik manajemen laba. Setelah mengadopsi IAS 39, PSAK 50 (2011) tidak memperkenankan lagi entitas untuk melakukan reklasifikasi instrumen keuangan dari kelompok 'diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi' (FVTPL) ke kelompok 'tersedia untuk dijual' (AFS) atau sebaliknya, kelompok FVTPL ke kelompok investasi 'dimiliki hingga jatuh tempo' (HTM) atau sebaliknya. Namun PSAK 55 (2011) memperkenalkan entitas untuk melakukan reklasifikasi dari kelompok FVTPL ke kelompok 'pinjaman yang diberikan dan piutang' (L&R) dan dari kelompok investasi AFS ke kelompok L&R (par.55 dan 56). Pada saat reklasifikasi dari kelompok FVTPL ke kelompok L&R, laba (rugi) yang muncul diakui dalam laporan laba rugi. Sedangkan saat reklasifikasi dari kelompok AFS ke kelompok L&R, laba (rugi) yang muncul diakui sebagai ekuitas.

Selain itu dalam reklasifikasi, PSAK 55 (2011) memperkenalkan adanya *tainting rule* (par.08). *Tainting rule* memperbolehkan entitas untuk melakukan reklasifikasi dari HTM ke AFS jika : (a) mendekati jatuh tempo atau tanggal pembelian kembali, (b) setelah entitas telah memperoleh secara substansial seluruh

jumlah pokok aset keuangan tersebut sesuai jadwal pembayaran atau entitas telah memperoleh pelunasan dipercepat, (c) terkait dengan kejadian diluar kendali entitas. Penerapan atas *tainting rule*, tidak memperbolehkan entitas untuk mengkasifikasikan aset keuangan sebagai HTM, jika dalam tahun berjalan atau dalam kurun waktu dua tahun sebelumnya, telah menjual atau mereklasifikasi kelompok HTM ke AFS dalam jumlah yang lebih dari jumlah yang tidak signifikan sebelum jatuh tempo.

Adopsi IAS 39 menjadi PSAK 55 (2011) juga berdampak pada pengakuan dan pengukuran derivatif melekat atau instrumen majemuk. Secara substansi tidak terdapat perbedaan antara PSAK 50 (1998) dan PSAK 55 (2011) dalam pengakuan *opsi* konversi yang melekat. Namun perbedaan antara PSAK 50 (1998) dan PSAK 55 (2011) terletak pada penyajian instrumen majemuk yang kemudian diatur lebih rinci pada PSAK 50 (2010) par.31. Pada saat menerbitkan instrumen majemuk, PSAK 50 (1998) memberikan alternatif kepada entitas untuk mengakui *opsi* konversi sebagai kelompok liabilitas saja atau dipisahkan antara ekuitas dan liabilitas.

Sedangkan PSAK 55 (2011) PA 42 mengharuskan entitas untuk memisahkan *opsi* konversi sebagai kelompok ekuitas dan liabilitas. Perbedaan antara diakui sebagai liabilitas saja dan dipisahkan sebagai kelompok ekuitas dan liabilitas akan berpengaruh pada perbedaan pencatatan nilai buku instrumen majemuk. Hal ini disebabkan adanya perbedaan beban bunga antara kedua metode tersebut.

Saat mengakui *opsi* konversi sebagai liabilitas saja akan memiliki beban bunga yang lebih kecil dibandingkan memisahkan *opsi* konversi menjadi kelompok ekuitas dan liabilitas. Karena premi (diskon) yang bersifat mengurangi (menambah) beban pada saat mengakui sebagai kelompok liabilitas saja lebih besar (kecil) dari pada memisahkan *opsi* konversi menjadi ekuitas dan liabilitas. Perbedaan pengakuan *opsi* konversi pada saat penerbitan akan berakibat pada perbedaan beban yang nantinya akan diakui dalam laporan laba rugi, sehingga dapat mengurangi kualitas laba. Untuk meningkatkan kualitas laba, PSAK 55 (2011) mewajibkan entitas untuk mengakui *opsi* konversi secara terpisahkan antara kelompok entitas dan liabilitas (PA 42).

Kemudian pada saat instrumen majemuk dikonversi menjadi saham biasa, PSAK 50 (1998) memberikan pilihan kepada entitas untuk mengukur saham biasa dengan dua metode yang berbeda, yaitu metode nilai buku dan metode nilai pasar. Metode nilai pasar memperlakukan *opsi* saat dikonversi sebagai transaksi pelunasan hutang obligasi sebelum jatuh tempo, sehingga entitas harus mengakui laba (rugi) yang terjadi dalam laporan laba rugi. Sedangkan metode nilai buku memperlakukan *opsi* saat dikonversi sebagai transaksi modal, sehingga entitas tidak perlu mengakui adanya laba (rugi) dalam laporan laba rugi.

Setelah mengadopsi IAS 39, pada saat *opsi* dikonversi menjadi saham biasa PSAK 55 (2011) PA 43 (g) hanya memperbolehkan manajer mengukur saham biasa menggunakan metode nilai buku saja. Sehingga pembatasan dalam memilih metode pengukuran ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas laba yang dilaporkan. Dalam instrumen majemuk atau campuran PSAK 55 (2011) par.10 juga mengatur tentang pengakuan *opsi* yang dikonversi karena dipengaruhi oleh insentif. PSAK 55 (2011) par. 10 mengakui insentif sebagai beban kerugian dalam laporan laba rugi

yang kemudian diatur lebih rinci dalam PSAK 50 (2010) tentang penyajian instrumen keuangan (par.32-33).

Pengakuan insentif dalam bentuk saham biasa tambahan sebagai beban kerugian konversi akan pengaruh pada penurunan laba. Sebelum mengadopsi IAS 39 peraturan tentang pengakuan atas insentif pada instrumen majemuk atau campuran belum ada. Dengan demikian, adopsi standar akuntansi internasional memberikan peraturan yang jelas dalam pengakuan insentif pada instrumen majemuk. Sehingga dengan mengadopsi standar akuntansi internasional dapat meningkatkan kualitas laba suatu entitas.

Perbedaan yang muncul akibat adopsi IAS 39 selanjutnya ialah dalam pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN), PSAK 50 (1998) tidak mengatur pemulihan pada penurunan nilai (*impairment*) sehingga kenaikan atau penurunan atas nilai wajar dicatat sebagai komponen ekuitas. Sebelum mengadopsi IAS 39, CKPN dibentuk berdasarkan ekspektasi kerugian kredit (*expectation loss*) (par.18). Sehingga entitas dapat menumpuk cadangan yang berasal dari laba dengan alasan kehati-hatian. Penumpukan CKPN dilakukan ketika entitas merasa kemungkinan kreditnya tidak tertagih lebih besar. Kebijakan inilah yang kemudian digunakan oleh manajemen sebagai celah untuk melakukan manajemen laba.

Untuk meningkatkan kualitas laba, PSAK 55 (2011) mewajibkan entitas untuk melakukan pemulihan atas penurunan nilai yang terjadi sebelumnya. Pemulihan ini berlaku ketika pada periode berikutnya jumlah kerugian penurunan nilai berkurang, maka kerugian penurunan nilai yang sebelumnya telah diakui harus dipulihkan kembali dan jumlah pemulihan tersebut diakui pada laporan laba rugi (par.72). Selain itu PSAK 55 (2011) mewajibkan entitas untuk menunjukkan bukti objektif pada saat pembentukan CKPN (par. 65), antara lain:

- a. Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau peminjam.
- b. Pelanggaran kontrak, seperti terjadinya tunggakan pembayaran pokok atau bunga.
- c. Restrukturisasi atau keringanan akibat pihak peminjam mengalami kesulitan.
- d. Peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya.
- e. Hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan.
- f. Kemungkinan besar bangkrut.

Dengan adanya batasan inilah diharapkan dapat mengurangi praktik manajemen laba dan dapat meningkatkan kualitas laba.

Hipotesis

Laba yang berkualitas adalah laba akuntansi yang mencerminkan kinerja perusahaan yang sebenarnya dengan sedikit atau tidak dipengaruhi oleh manajemen laba yang disebabkan dari penerapan konsep akrual dalam akuntansi (Grahita (2001) dalam Sugiarto dan Jang (2007)). Semakin tinggi tingkat manajemen laba dalam laporan keuangan, maka kualitas laba tersebut akan semakin rendah. Dalam kerangka

konseptual PSAK, laba dikatakan berkualitas apabila relevan, dapat dipahami, dapat diuji kebenarannya, netral, tepat waktu, dapat dibandingkan, dan lengkap. Oleh sebab itu, dalam rangka meningkatkan kualitas laba dalam laporan keuangan Dewan Standar Akuntansi Keuangan melakukan adopsi standar akuntansi internasional dan salah satunya ialah IAS 39 yang kemudian menjadi PSAK 55 (revisi 2011).

. Penerapan PSAK 55 (2011) membatasi manajemen dalam melakukan manajemen laba melalui komponen akrual. PSAK 55 (2011) sudah tidak memperkenankan entitas untuk melakukan reklasifikasi instrumen keuangan dari kelompok 'diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi' (FVTPL) ke 'tersedia untuk dijual' (AFS) atau sebaliknya, dari kelompok FVTPL ke 'dimiliki hingga jatuh tempo' (HTM) atau sebaliknya. Namun PSAK 55 (2011) memperkenankan entitas untuk melakukan reklasifikasi dari kelompok FVTPL ke kelompok 'pinjaman yang diberikan dan piutang' (L&R) dan dari kelompok investasi AFS ke kelompok L&R (par.55 dan 56). Meskipun entitas diperkenankan untuk melakukan reklasifikasi dari FVTPL ke kelompok L&R dan dari AFS ke kelompok L&R, entitas tetap diberikan batasan pada saat reklasifikasi sehingga kesempatan manajer untuk melakukan manajemen laba berkurang. Selain itu PSAK 50 (2011) juga menerapkan *tainting rule* (par.08), dimana entitas tidak boleh mengklasifikasikan aset keuangan sebagai HTM, jika dalam tahun berjalan atau dalam kurun waktu dua tahun sebelumnya, telah menjual atau mereklasifikasi kelompok HTM ke AFS dalam jumlah yang lebih dari jumlah yang signifikan sebelum jatuh tempo. *Tainting rule* masih memperbolehkan entitas untuk melakukan reklasifikasi dari HTM ke AFS dengan kondisi tertentu.

Selain mengatur tentang reklasifikasi, PSAK 55 (2011) juga mengatur tentang pengakuan atas instrumen derivatif melekat atau instrumen majemuk. Pengaruh dari penerapan IAS 39 pada instrumen derivatif lebih bersifat pada penyederhanaan aturan dalam pengakuan dan pengukuran *opsi*. Pada saat instrumen majemuk diterbitkan PSAK 55 (2011) mewajibkan untuk memisahkan *opsi* dari instrumen induk dan mengakuinya secara terpisah (PA 42). Pada saat *opsi* dikonversi menjadi saham biasa, PSAK 55 (2011) membatasi metode yang digunakan untuk mengukur saham biasa. Sehingga metode yang dapat digunakan hanyalah metode nilai buku. Selain itu, PSAK 55 (2011) juga mengatur tentang pengakuan atas insentif dalam bentuk saham biasa tambahan. Ketika *opsi* dikonversi karena dipengaruhi oleh insentif maka saham biasa tambahan yang diberikan langsung diakui sebagai beban kerugian konversi dalam laporan laba rugi (par.10). Dengan penyederhanaan alternatif ini diharapkan celah untuk melakukan manajemen laba dapat dikurangi.

Adopsi IAS 39 menjadi PSAK 55 (2011) juga berdampak pada pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN). PSAK 55 (2011) mengatur lebih ketat dan objektif dalam pembentukan CKPN dibandingkan sebelum adopsi. Pembatasan ini dilakukan guna mengurangi tingkat manajemen laba mengingat bahwa CKPN merupakan komponen akrual yang rentan terhadap manajemen laba. Apabila pada

periode setelah pembentukan CKPN, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang, maka kerugian penurunan yang sebelumnya telah diakui harus dipulihkan kembali dan jumlah pemulihan diakui dalam laporan laba rugi. Dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan kualitas laba.

Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh Anggraita (2012), penurunan praktik manajemen laba setelah penerapan PSAK 50/55 (revisi 2006) disebabkan karena berdasarkan PSAK yang telah mengadopsi standar akuntansi internasional, perhitungan CKPN harus berdasarkan data yang bersumber dari data-data transaksi minimal tiga tahun atau lima tahun sebelumnya dan didasarkan pada bukti-bukti objektif sehingga sulit bagi manajemen untuk melakukan manajemen laba. Penelitian lain yang dilakukan Barth dkk. (2006); Chen dkk. (2009); Zhou dkk. (2009); dan Paulo dkk. (2013) menemukan bukti bahwa terdapat peningkatan kualitas laba setelah mengadopsi IFRS/IAS. Berdasarkan pada penjelasan tersebut, maka hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah:

H1 : Kualitas laba meningkat setelah mengadopsi IAS 39

C. METODE PENELITIAN

Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data sekunder yaitu: Laporan Laba Rugi, Laporan Arus Kas, Laporan Posisi Keuangan, Catatan Atas Laporan Keuangan, Laporan Kualitas dan Informasi Lain. Data tersebut diperoleh dari Laporan Keuangan Tahunan yang telah dipublikasikan dan telah diaudit (*audited*) di website Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) dan website Bank Indonesia (www.bi.go.id).

Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi seluruh perusahaan perbankan yang telah *go public* dan terdaftar di BEI dari tahun 2008 sampai 2013. Alasan penggunaan perusahaan perbankan sebagai sampel penelitian karena dalam laporan posisi keuangan, perusahaan perbankan memiliki instrumen keuangan yang lebih banyak daripada perusahaan non-perbankan. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan *judgement sampling* dengan kriteria yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan penelitian. Pada penelitian ini kriteria sampel yang digunakan adalah:

1. Perbankan yang menjalankan usaha Bank Umum Konvensional. Tidak termasuk didalamnya perbankan yang menjalankan usaha berdasarkan prinsip syariah.
2. Perbankan yang telah *go public* dan telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) secara berturut-turut dari tahun 2008 sampai dengan 2013.

3. Perusahaan perbankan yang melaporkan secara lengkap “Laporan Keuangan Tahunan” dan “Laporan Kualitas Aset dan Informasi Lainnya” dari tahun 2008 sampai 2013

D. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Berdasarkan pada hasil analisis statistik deskriptif yang telah dilakukan menggunakan perangkat lunak SPSS 18.0, maka hasil yang diperoleh sebagai berikut:

Tabel 4.1
Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Rata-rata DA sebelum	27	-0.3600	0.3126	-0.001536	0.1489986
Rata-rata DA sesudah	27	-0.4063	0.4214	-0.000706	0.2098467

Sumber: *Output SPSS, Lampiran III*

Penelitian ini memfokuskan hasil statistik deskriptif pada nilai rata-rata (*mean*) masing-masing variabel. Untuk setiap variabel, diketahui bahwa jumlah dalam penelitian ini sebanyak 27 observasi. Dimana nilai rata-rata kualitas laba sebelum dan sesudah adopsi IAS 39 pada model Beaver dan Engel (1996) adalah -0,001536 dan -0,000706.

Model Beaver dan Engel (1996) menunjukkan nilai rata-rata *discretionary accruals* (DA) sebelum adopsi IAS 39 memiliki rasio lebih rendah daripada nilai rata-rata *discretionary accruals* (DA) sesudah adopsi IAS 39 dengan selisih 0,000830. Menurut Jones (1995) *discretionary accruals* (DA) adalah akrual yang dengan sengaja diterapkan oleh manajemen untuk tujuan tertentu. Sehingga semakin tinggi nilai DA mengindikasikan bahwa kualitas laba semakin rendah. Berdasarkan dari perhitungan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa kualitas laba sesudah adopsi IAS 39 lebih rendah daripada kualitas laba sebelum adopsi IAS 39, meskipun selisih nilai DA-nya tidak berbeda signifikan yaitu 0.000830.

Uji Normalitas

Penelitian ini menggunakan One-Sample Kolmogorov-Smirnov (K-S) Test untuk melakukan uji normalitas data. Data dikatakan normal apabila nilai sig. > 0,05, sebaliknya data tidak normal apabila nilai sig. < 0,05. Berdasarkan pada hasil uji normalitas yang telah dilakukan dengan perangkat lunak SPSS 18.0, maka hasil yang diperoleh sebagai berikut:

Tabel 4.2
Hasil Uji Normalitas

	Rata-Rata DA Sebelum Adopsi IAS 39	Rata – Rata DA Sesudah Adopsi IAS 39
N	27	27
Asymp. Sig. (2-tailed)	0.820	0.997

Sumber: *Output SPSS, Lampiran III*

Dari hasil uji normalitas yang telah dilakukan dengan metode Kolmogorov-Smirnov, diperoleh nilai sig. sebesar 0,820 untuk rata-rata DA sebelum mengadopsi IAS 39 dan nilai sig. sebesar 0.997 untuk rata-rata DA sesudah mengadopsi IAS 39. Nilai sig. ini lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data telah terdistribusi secara normal.

Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis untuk model Beaver dan Engel (1996) menggunakan pengujian *Paired-Sample T Test*. Hasil dari uji *Paired-Sample T Test* akan digunakan untuk menganalisis apakah kualitas laba meningkat setelah mengadopsi IAS 39 pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kriteria pengambilan keputusan pengujian hipotesis adalah H_0 diterima jika signifikansi $< 5\%$ dan rata-rata DA sesudah adopsi IAS 39 $<$ rata-rata DA sebelum adopsi IAS 39.

Hasil uji t-2 sampel berpasangan (*paired sample*) yang telah dilakukan disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4.3
Uji t-2 Sampel Berpasangan

	Paired Samples Test		t	df	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation			
Rata-Rata DA Sebelum – Rata-Rata DA Sesudah	-0.0008294	0.2870970	-0.015	26	0.988

Sumber: *Output SPSS, Lampiran III*

Dari tabel 4.8 nilai signifikansi (*one-tailed*) sebesar 0,494 yang diperoleh dari 0.988 (sig. 2-tailed) dibagi 2. Hal ini berarti bahwa kualitas laba pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia setelah adopsi *International Accounting Standards* (IAS) 39 tidak meningkat.

Analisis Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dengan uji-t untuk dua sampel berhubungan (*paired sample t-test*) menunjukkan bahwa kualitas laba pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI setelah adopsi *International Accounting Standards* (IAS) 39 tidak meningkat. Dengan kata lain, H_0 yang menyatakan bahwa

kualitas laba meningkat setelah mengadopsi IAS 39 tidak diterima. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Handoyo (2011). Saputra (2013), dan Santy dkk. (2014) yaitu tidak terdapat perbedaan kualitas laba sebelum dan sesudah adopsi IAS 39 pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI. Penelitian ini juga tidak mendukung penelitian Barth (2005), Chen (2009), Zhou dkk (2006), dan Paulo dkk (2013) yang membuktikan bahwa kualitas laba meningkat setelah mengadopsi IAS/IFRS. Berdasarkan penelitian tersebut dijelaskan bahwa dengan mengadopsi IAS/IFRS dapat mengurangi kesempatan manajemen untuk melakukan manajemen laba.

Perbedaan hasil penelitian ini diduga disebabkan karena dua faktor. *Pertama* industri perbankan merupakan industri dengan regulasi yang lebih ketat dibandingkan dengan industri lainnya (Anggraita, 2012). Dugaan ini diperkuat dengan diterbitkannya Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) 2001 dan 2008. Sebelum mengadopsi IAS 39 pun Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia sudah memberikan batasan-batasan bagi manajer dalam mengatur dan mengelola laporan keuangan perusahaan, sehingga faktor inilah yang menyebabkan tidak terdapatnya perbedaan kualitas laba antara sebelum dan sesudah adopsi IAS 39.

Kedua, berdasarkan sampel penelitian, perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tidak memiliki transaksi atas instrumen campuran atau derivatif melekat. Meskipun di dalam PSAK 55 (2011) terdapat aturan yang mengatur tentang transaksi derivatif melekat, namun aturan ini tidak berpengaruh dengan kondisi di Indonesia yang merupakan negara berkembang.

E. PENUTUP

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji kualitas laba yang dilaporkan antara sebelum dan sesudah adopsi IAS 39 pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI dengan menggunakan model akrual khusus yang dikembangkan oleh Beaver dan Engel (1996). Hasil pengujian menemukan bahwa tidak terdapat peningkatan kualitas laba pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) setelah mengadopsi *International Accounting Standards* (IAS) 39. Dengan kata lain hipotesis dalam penelitian ini tidak diterima.

Tidak terdapatnya peningkatan kualitas laba pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) setelah mengadopsi IAS 39 disebabkan oleh dua faktor. *Pertama*, industri perbankan memiliki regulasi dan peraturan yang lebih ketat dibandingkan dengan industri lainnya (Anggraita, 2012). Sebab dalam mengelola laporan keuangan, khususnya instrumen keuangan selain berpedoman pada PSAK 55 yang telah mengadopsi IAS 39 perbankan juga berpedoman pada Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI). *Kedua*, perusahaan perbankan yang terdaftar

di BEI tidak memiliki instrumen campuran. Meskipun di dalam PSAK 55 hasil adopsi IAS 39 terdapat aturan yang mengatur atas derivatif melekat, namun peraturan tersebut tidak berpengaruh pada kondisi di Indonesia yang merupakan negara berkembang.

Keterbatasan dan Saran

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah tidak mempertimbangkan faktor lain baik yang berasal dari dalam maupun luar perusahaan yang juga berpengaruh pada penerapan PSAK 55 hasil adopsi IAS 39, seperti *corporate governance*, struktur kepemilikan, sumber daya manusia, pemerintah, dan teknologi. Penelitian ini hanya terbatas pada perusahaan perbankan, sehingga tidak dapat digeneralisasi pada perusahaan yang lain.

Sekarang ini perkembangan standar akuntansi internasional yang mengatur instrumen keuangan sudah berkembang pesat dengan diterbitkannya PSAK 55 (revisi 2013) yang merupakan hasil adopsi dari IFRS 9 : *Financial Instruments* menggantikan PSAK 55 (2011) adopsi IAS 39 (2009). Sehingga disarankan penelitian selanjutnya untuk melihat pengaruh dari implementasi penerapan PSAK 55 hasil adopsi dari IFRS 9 dalam meningkatkan kualitas laba perusahaan.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Anggraita, Viska, (2012), "Dampak Penerapan PSAK 50/55 (revisi 2006) terhadap manajemen laba diperbankan: Peranan Mekanisme Corporate Governance, Struktur Kepemilikan, dan Kualitas Audit", Jurnal Simposium Nasional Akuntansi (SNA), XV Banjarmasin
- Barton, J. and Simo, P.J, (2002), "The Balance Sheet As an Earnings Management Constraint", The Accounting Review, December, pp. 1-27
- Barth, Mary E.; Landsman, Wayne R.; and Lang, Mark H., (2006), "International Accounting Standards and Accounting Quality", Research Paper, No. 1976
- Chariri, Anis; Ghozali, Imam, (2005), Teori Akuntansi, (Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang).
- Chen, Huifa; Tang, Qingliang; Jiang, Yihong; Lin, Zhijun, (2009), "International Financial Reporting Standards and Accounting Quality : Evidence from the European Union".
- Dyckman, Thomas R.; Dukes, Roland E.; and Davis, Charles J., (2001), Akuntansi Intermediate Jilid II, Edisi Ketiga, Erlangga, Jakarta.
- Fiechter, Peter, (2010), "Application of The Fair Value Option Under IAS 39 : Effects on The Volatility of Bank Earnings", Journal of Economic Literature, Classifications : G21, M41
- Hartono, Jogiyanto, (2007), Metodologi Penelitian Bisnis : Salah Kaprah dan Pengalaman Pengalaman, (BPFE UGM, Yogyakarta).

- Handoyo, Benediktus Yogi, (2011), “Perbedaan Kualitas Laba Sebelum dan Sesudah Adopsi IAS 32 dan 39 pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI”, Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya Yogyakarta. (tidak dipublikasikan)
- Harnanto, (2003), Akuntansi Keuangan Menengah, Buku Dua, (BPFE UGM, Yogyakarta).
- Ikatan Akuntansi Indonesia, (2009), Standar Akuntansi Keuangan per 1 Juli 2009, (Salemba Empat, Jakarta).
- Ikatan Akuntansi Indonesia, (2012), Standar Akuntansi Keuangan per 1 Juni 2012, Cetakan I, Ikatan Akuntansi Indonesia, Jakarta.
- Jang, Leisa; Sugiarto, Bambang; Siaigan, Dergibson, 2007, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laba pada Perusahaan Manufaktur di BEI. Akuntabilitas Volume 6 Nomor 2, 142-149.
- Kieso, Donald E., Jerry J. Weygandt, dan Terry D. Warfield, (2011), Intermediate Accounting, vol. 4 IFRS Edition, John Wiley & Sons, United States of America.
- Kieso, Donald E., Jerry J. Weygandt, dan Terry D. Warfield, (2008), Intermediate Accounting Jilid 2, Edisi Keduabelas, Erlangga, Jakarta.
- Martani, Dwi, (2010), “PSAK 50 dan 55 Overview”, Powerpoint, diakses dari <http://staff.blog.ui.ac.id/martani/files/2011/03/PSAK-50-dan-55-overview.pdf> pada tanggal 24 Juli 2014.
- Paulo, Edilson; de Araújo Pontes Girão, L. F.; Carter, D.; dan de Sousa, R. S, (2013), “The Impact of the Adoption of International Financial Reporting Standards on the Quality of Accounting Information of the Brazilian and European Public Firm”.
- Rahmawati, 2007, Model Pendeteksian Manajemen Laba Pada Industri Perbankan Publik di Indonesia dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Perbankan, Jurnal Akuntansi dan Manajemen Volume XVIII Nomor 1.
- Santy, P., Tawakkal, dan Pontoh, G.T., (2014), “Pengaruh Adopsi IFRS Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Perbankan Di Bursa Efek Indonesia”, Jurnal Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Hasanuddin Makassar.
- Saputra, Fulgentio Benifo B., (2013), “Analisis Perbedaan Kualitas Laba Sebelum dan Sesudah Adopsi IAS 39 (2005) Menjadi PSAK 55 (2006) Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”, Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya Yogyakarta. (tidak dipublikasikan)
- Sulistiyanto, Sri H., (2008), Manajemen Laba : Teori dan Model Empiris, Cetakan I, Grasindo, Jakarta.
- Zeghal, Daniel, Chtourou, Sonda M., dan Fourati, Yosra M., (2012), “The Effect of Mandatoy Adoption of IFRS on Earnings Quality : Evidence from the European Union”, Journal of International Accounting Research, American Accounting Association, Vol. 11, No. 2, pp. 1-25